

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia, serta berada diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, penduduk di negara Indonesia tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa, dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa.

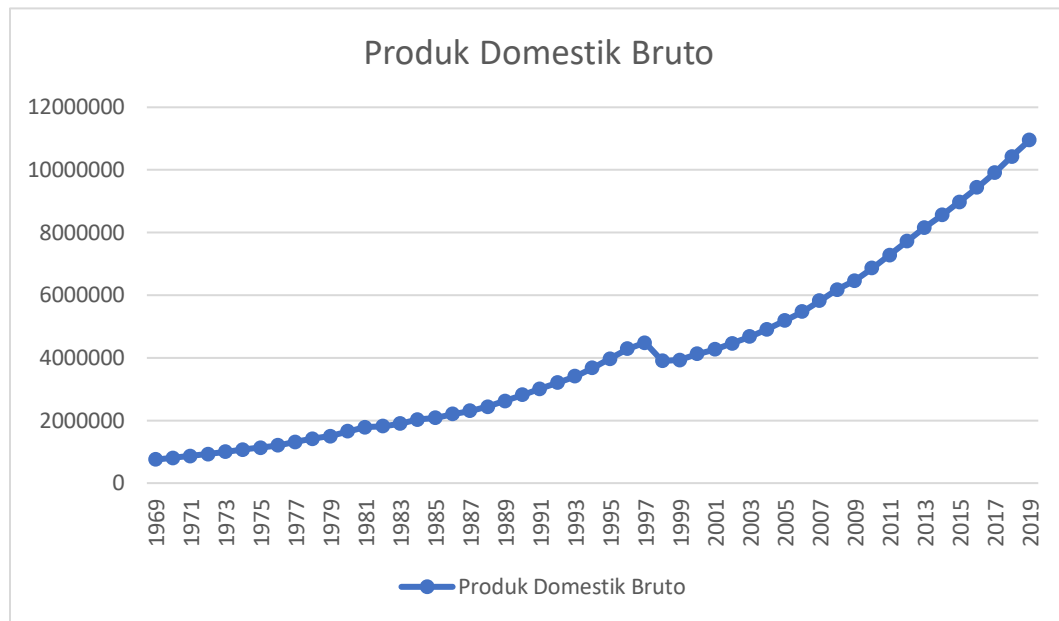
Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu Kota nya adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, Bahasa, dan agama. Berdasarkan ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yaitu Mongoloid dan Melanesia. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU-11°08LS dan dari 95°BT - 141°45'BT. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan las perairannya 3.257.483 km².

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia. Jumlah data PDB yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 51 tahun yaitu periode 1969-2019.



Gambar 4.1
PDB Indonesia tahun 1969-2019 berdasarkan harga konstan dengan
tahun dasar 2010 (dalam miliar rupiah)

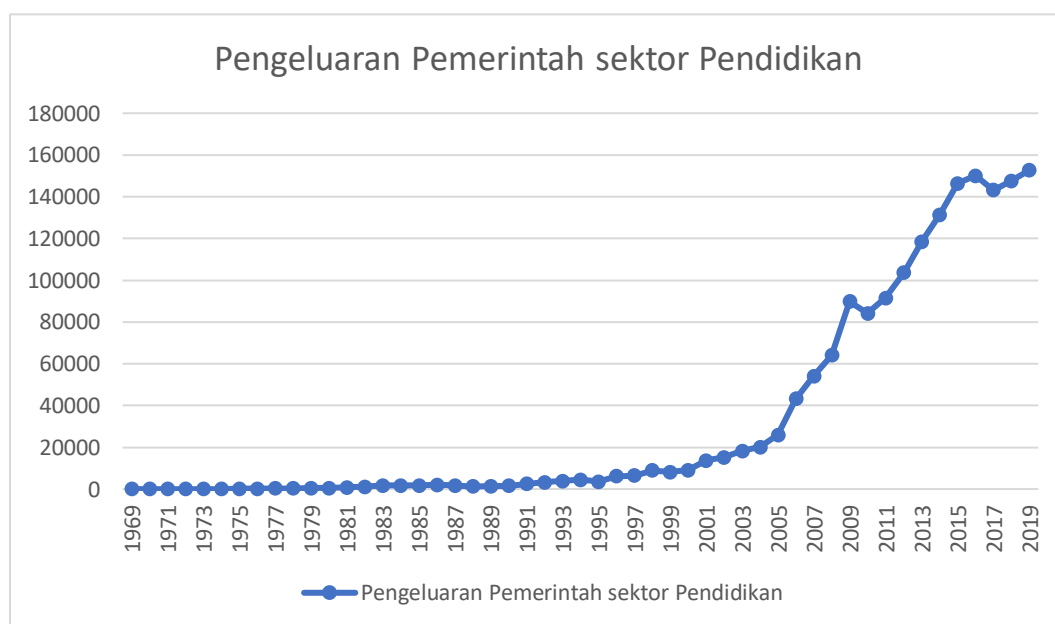
Sumber: lampiran 2

Pada Gambar 4.1, terlihat secara umum PDB Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 1998 dimana terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Terjadinya krisis tahun 1998 diawali oleh krisis keuangan Asia pada pertengahan tahun 1997 dan semakin parah pada tahun 1998 sehingga mengakibatkan penurunan PDB yang cukup besar. Dimana PDB Indonesia tahun 1998 hanya sebesar 3.897.608,90 miliar rupiah, turun hingga -13,12% laju pertumbuhan ekonominya dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1997, dimana besar PDB nya adalah 4.486.545,40 miliar rupiah. Akibat dari krisis ekonomi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia yaitu inflasi menjadi sangat tinggi, serta keadaan Indonesia semakin parah dengan utang luar negeri yang jatuh tempo bersamaan. Pada tahun 2008 perekonomian seluruh negara sedang mengalami keadaan resesi ekonomi global, Indonesia sendiri belajar dari pengalaman krisis yang pernah terjadi sebelumnya sehingga pemerintah sudah bisa mengantisipasi keadaan dan membuat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 relatif aman yaitu sebesar 6,1% atau sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya

yaitu sebesar 6,3%. Pada 1 dekade terakhir laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rata-rata 5,41% dan nilai PDB nya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tercatat nilai PDB Indonesia tahun 2019 sebesar 10.949.037,80 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01%.

4.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental dalam sebuah negara. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia akan terus bertambah yang nantinya akan memberikan kontribusi untuk pembangunan negara. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Perkembangan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dari tahun 1969-2019 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



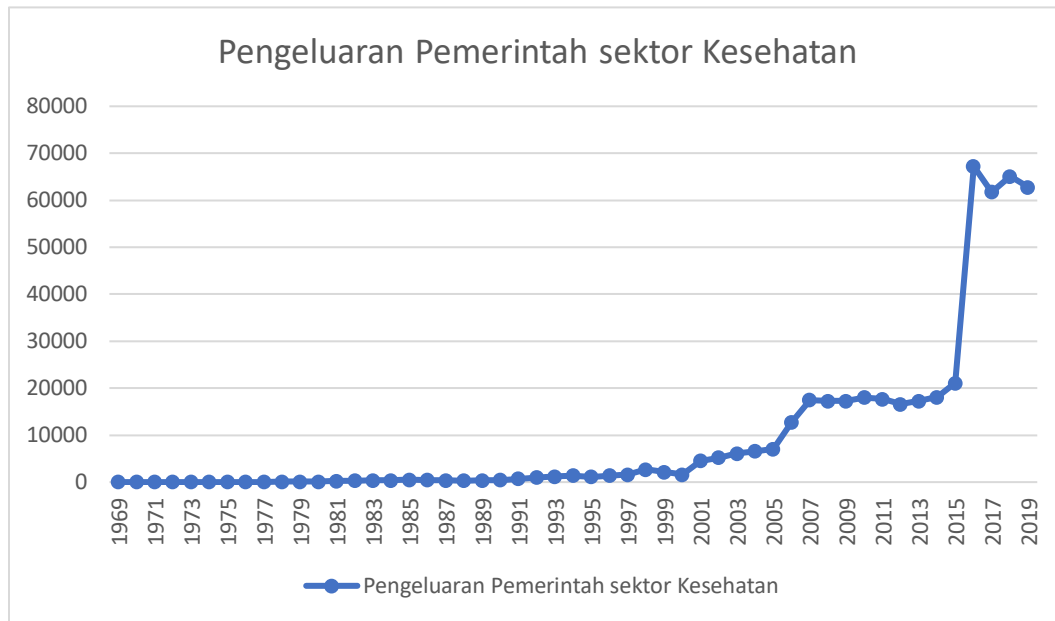
Gambar 4.2
Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan tahun 1969-2019
(dalam milliar rupiah)

Sumber: lampiran 2

Jika dilihat dari Gambar 4.2 terlihat bahwa sejak tahun 1969-2019 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara umum memiliki tren yang meningkat. Pada periode 1969-2000, anggaran pendidikan memiliki tren yang konstan karena terjadi kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu banyak. Rata-rata perubahan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan hanya berkisar antara 0,1-0,9 persen. Peningkatan yang terlihat tinggi dalam pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terjadi pada tahun 2009, dimana pengeluaran pendidikannya sebesar 89.900,00 miliar rupiah atau 12,54% dari total APBN, dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 besar pengeluaran pendidikannya sebesar 64.029,17 miliar rupiah. Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai anggaran pendidikan yang tercantum dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, dimana dalam UU ini mengatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja negara. Sehingga sejak tahun 2003 pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan terus meningkat hingga sekarang.

4.1.2.3 Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Anggaran sektor kesehatan selalu lebih kecil daripada sektor pendidikan, karena dalam UU no. 9 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, berbeda dengan pendidikan yang anggarannya 20% dari belanja negara. Perkembangan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari tahun 1969-2019 dapat dilihat dari Gambar 4.3.



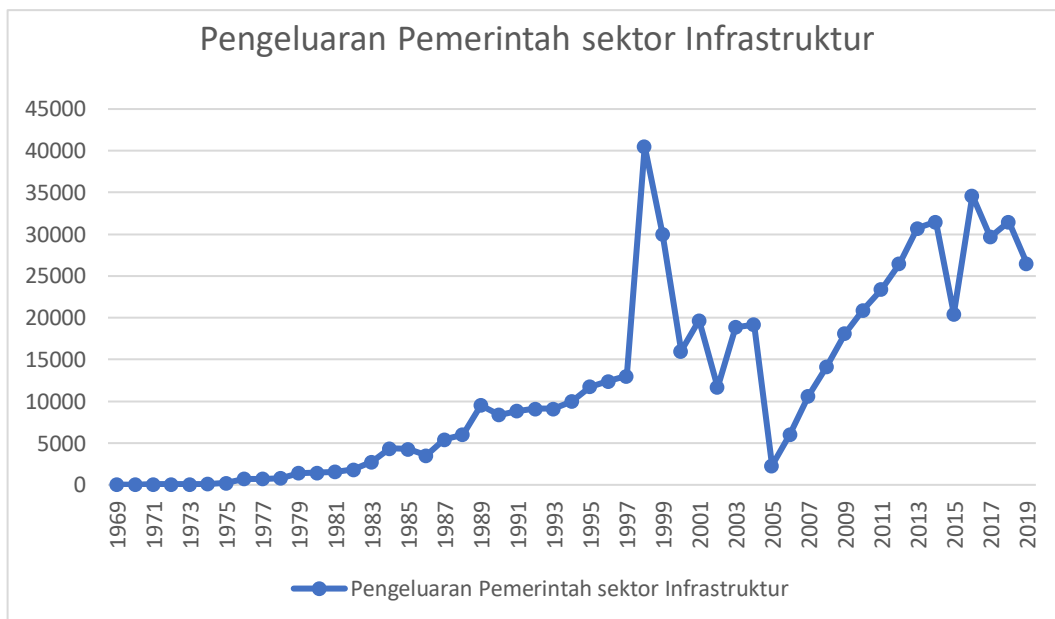
Gambar 4.3
Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan tahun 1969-2019
(dalam miliar rupiah)

Sumber: lampiran 2

Periode tahun 1969-2000 anggaran pemerintah di sektor kesehatan cenderung konstan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan total pengeluaran 67.214,00 miliar rupiah atau 5,07% dari total APBN, peningkatan ini sangat tinggi yaitu sebesar 218% dari tahun sebelumnya 2015 yang dimana total pengeluarannya hanya sebesar 21.113.20 miliar rupiah atau 1,51% dari total APBN. Sejak tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga adanya program Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Sejak tahun 2009 seharusnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan mengalami kenaikan yang cukup baik dengan adanya UU no.9 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.

4.1.2.4 Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur sendiri tidak kalah penting dengan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan bagian integral dari pembangunan di Indonesia. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Pengeluaran sektor infrastruktur untuk pembangunan yang lebih baik seperti akses jalan raya, gedung-gedung, perumahan, fasilitas umum dan lain-lain, selain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, juga diharapkan akan mempermudah investasi dari para investor ataupun pihak swasta. Penelitian ini membahas sektor infrastruktur tahun 1969-2004 diwakili oleh pembiayaan proyek, dan dilanjutkan tahun 2005-2019 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum. Hal ini akan menyebabkan penurunan secara drastis dari tahun 2004 ke tahun 2005 terkait pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur. Perkembangan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur bisa dilihat dari Gambar 4.4.



Gambar 4.4
Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur tahun 1969-2019
(dalam miliar rupiah)

Sumber: lampiran 2

Periode tahun 1969-2019 pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur cenderung fluktuatif. Tahun 1969-1983 pengeluaran pemerintah di infrastruktur cukup konstan. Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 1998 dengan pengeluaran sebesar 40.540,90 miliar rupiah, ini menunjukkan pengeluaran tertinggi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan pidato Presiden pada 15 Agustus 1998 oleh Bapak Bachruddin Jusuf Habibie menyampaikan bahwa negara kita mendapat bantuan sebesar 14 Miliar US dollar dalam wujud simpati dan solidaritas dari dukungan luar negeri yang bisa dicairkan pada tahun anggaran tersebut untuk mendukung anggaran belanja dan neraca pembayaran kita. Presiden Habibie berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sepenuhnya, setelah itu memulihkan kurs rupiah kearah tingkat yang lebih wajar yang nantinya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Habibie juga berupaya memulihkan kepercayaan para investor swasta dengan menjaminkan bahwa Indonesia akan menjadi tempat yang sejuk dan aman untuk melakukan investasi yang menguntungkan dengan cara menyediakan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang lebih banyak. Pada tahun terakhir dalam penelitian ini yaitu tahun 2019 pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur sebesar 26.516,00 miliar rupiah atau 1,62% dari total APBN.

4.1.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Uji Stasioneritas

Sebelum melakukan uji kointegrasi, pertama-tama perlu dilakukan uji stasioneritas melalui uji akar unit dari data dengan menggunakan metode Phillips-Perron test (PP test), dimana jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 5 persen, maka data tersebut stasioner.

Tabel 4.1
Hasil Uji Akar Unit dengan Uji PP (tingkat level)

Variabel	Nilai PP
Y	1.0000
X1	0.9999
X2	0.9970
X3	0.3688

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai PP pada semua variabel lebih besar dari alpha 5 persen (0,05). Dapat disimpulkan bahwa data variabel nilai PDB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur bersifat tidak stasioner. Karena semua data variabel dalam penelitian bersifat nonstasioner pada tingkat level atau $I(0)$, maka diperlukan adanya uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat berapakah data akan stasioner. Uji derajat integrasi menunjukkan hasil dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Akar Unit dengan Uji PP (tingkat First Difference) dengan Trend and Intercept

Variabel	Nilai PP
D(Y)	0.0027
D(X1)	0.0001
D(X2)	0.0000
D(X3)	0.0000

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 6.2, nilai PP pada semua variabel lebih kecil dari nilai alpha 5 persen (0,05) sehingga semua data yang diujikan stasioner pada tingkat *first difference* dengan *trend and intercept*. Setelah data bersifat stasioner pada uji *first difference* maka dilanjutkan dengan uji kointegrasi.

4.1.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan uji selanjutnya setelah uji unit root. Tujuan dilakukannya uji kointegrasi adalah untuk menguji stasionaritas residual regresi kointegrasi. Stasioneritas residual sangat penting jika ingin mengembangkan suatu model dinamis. Hubungan kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui adanya hubungan kointegrasi dilakukan uji Johansen Cointegration. Apabila trace statistic dan maximum eigenvalue lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diketahui bahwa terdapat kointegrasi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Kointegrasi dengan Uji Johansen

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.685691	101.2931	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.411018	45.73886	29.79707	0.0003
At most 2 *	0.309360	20.32958	15.49471	0.0086
At most 3	0.051995	2.563006	3.841466	0.1094
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.685691	55.55420	27.58434	0.0000
At most 1 *	0.411018	25.40928	21.13162	0.0117
At most 2 *	0.309360	17.76658	14.26460	0.0134
At most 3	0.051995	2.563006	3.841466	0.1094

Sumber: lampiran 4

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji *Johansen Cointegration* yang digunakan untuk mengetahui hubungan kointegrasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *trace statistic* sebesar 101.2931 lebih besar dari nilai kritis sebesar 47.85613 dengan taraf signifikansi 5%. Begitu juga nilai *maximum eigenvalue* sebesar 55.55420 lebih besar dari nilai kritis sebesar 27.58434 dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang diantara variabel didalam model persamaan tersebut.

4.1.3.3 Regresi Jangka Panjang (OLS)

Model Ordinary Least Squares dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka panjang. Tabel 4.4 adalah hasil estimasi jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4
Hasil regresi jangka panjang (OLS)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	166072.4	24550.15	6.764617	0.0000
D(X1)	11.29257	3.686438	3.063274	0.0037
D(X2)	8.309861	3.528455	2.355099	0.0228
D(X3)	-13.19291	3.691123	-3.574226	0.0008

Sumber: lampiran 5

Bentuk persamaan analisis regresi jangka panjang dengan metode OLS adalah sebagai berikut:

$$Y_t = 166072.4 + 11.29257X1_t + 9.309861X2_t - 13.19291X3_t + \varepsilon_t$$

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka panjang probabilitas untuk variabel X1 dan X2 signifikan pada taraf 5%, dan X3 negatif serta signifikan pada taraf 5%.

4.1.3.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji Jarque-Bera (JB test). Apabila nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Series	Skeness	Kurtosis	Jarque_Bera	Prob.
Residuals	0.231342	3.829899	1.880850	0.390462

Sumber: lampiran 6

Dari hasil Uji Jarque-Bera (JB) dapat diketahui bahwa nilai JB adalah sebesar 1.880850 dengan probabilitas 0.390462. Karena nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

4.1.3.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dilihat dari tolerance and variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF > 10 menunjukkan bahwa terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.03E+08	1.280943	NA
D(X1)	13.58983	1.287787	1.018472
D(X2)	12.45000	1.191681	1.150000
D(X3)	13.62439	1.151050	1.142928

Sumber: lampiran 6

Dari Tabel 4.6 hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa semua nilai VIF kurang dari 10. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas atau hubungan antar variabel bebas didalam model regresi.

4.1.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model memiliki varians yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji White. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji Heterokedastisitas dalam Tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	8.285557	Prob. F(9,40)	0.0000
Obs*R-squared	32.54342	Prob. Chi-Square(9)	0.0002

Sumber: lampiran 6

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai Obs*R-squared adalah sebesar 32.54342 dengan probabilitas sebesar 0.0002. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terkena heteroskedastisitas. Maka kita melakukan perbaikan yang dijelaskan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Perbaikan Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.842920	Prob. F(9,39)	0.5820
Obs*R-squared	7.979343	Prob. Chi-Square(9)	0.5362

Sumber: lampiran 6 (<https://www.youtube.com/watch?v=SaWEktWWQHY&t=564s>)

Dari hasil perbaikan uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Obs*R-squared adalah sebesar 7.979343 dengan probabilitas sebesar 0.5362. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari heteroskedastisitas.

4.1.3.4.4 Uji Autokorelasi

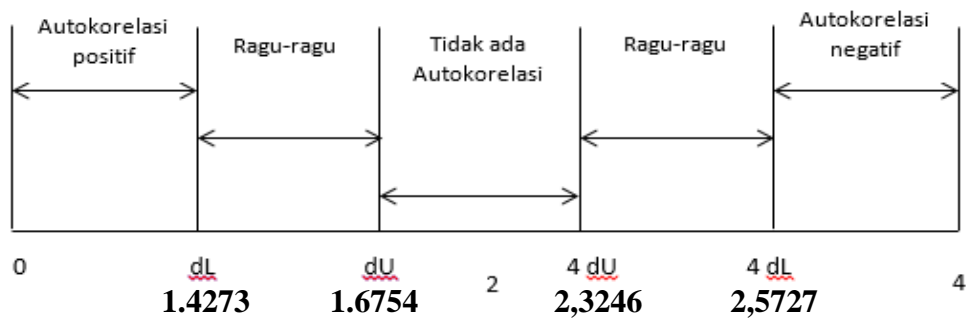
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi diantara residual dalam model atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari gejala autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Apabila nilai statistic D-W lebih dari dua dan kurang dari 4-du, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic		26.87503	Prob. F(1,45)	0.0000
Obs*R-squared		18.69567	Prob. Chi-Square(1)	0.0000
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19428.77	19994.50	0.971706	0.3364
D(X1)	-6.027451	3.170064	-1.901366	0.0637
D(X2)	3.084741	2.884799	1.069309	0.2906
D(X3)	-2.637246	2.996398	-0.880139	0.3835
Durbin-Watson stat			1.866662	

Sumber: lampiran 6

Dari hasil uji autokorelasi diketahui nilai statistic D-W sebesar 1.866662. Karena n dalam penelitian ini sebanyak 51 dan memiliki 3 variabel bebas, maka nilai dl sebesar 1.4273 dan nilai du sebesar 1.6754. Untuk melihat apakah ada autokorelasi dapat dilihat dari Gambar 4.5.



Gambar 4.5
Grafik uji Durbi-Watson

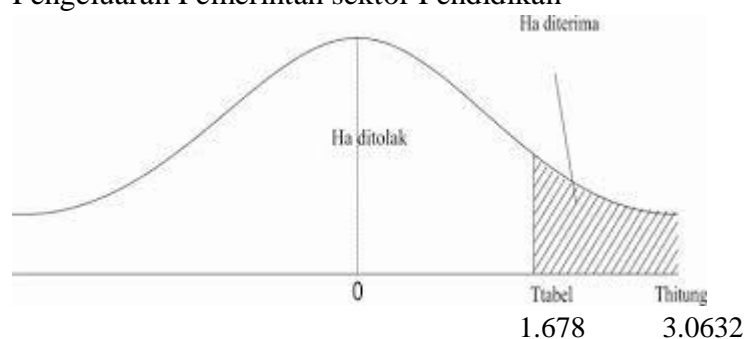
Berdasarkan grafik tersebut, nilai D-W sebesar 1.866662 berada di antara d_U dan $4d_U$ sehingga nilai D-W tersebut masuk kategori tidak ada autokorelasi atau bebas dari autokorelasi.

4.1.3.5 Pengujian Hipotesis

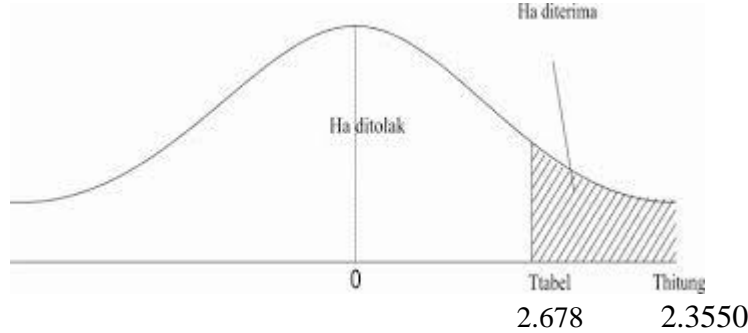
Tabel 4.10
Hasil Uji Pengujian Hipotesis

R-squared	0.337787
F-statistic	7.821363
F-tabel	2.80
T-tabel	1.678
β_1/Se_1	3.0632
β_2/Se_2	2.3550
β_3/Se_3	-3.5742

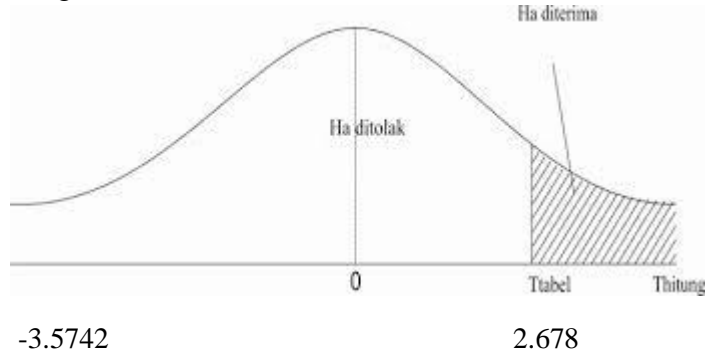
1. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan



2. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan



3. Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur



4.1.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas. Nilai R^2 mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2) yang mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Apabila nilai adjusted R^2 semakin mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat.

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.337787 (Hasil ini didapatkan dari hasil uji OLS pada Tabel 4.4 dan selengkapnya berada di lampiran 5). Hal ini menunjukkan bahwa nilai R^2 menjauhi angka 1, maka hubungan dengan variabel terikat semakin jauh atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai kurang baik. Dengan kata lain kontribusi variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor

infrastruktur dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 33%. Sisanya 67% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.1.3.5.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji simultan dilakukan dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Apabila F-statistik atau F-hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya apabila F-statistik atau F-hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dari hasil regresi dalam penelitian diketahui nilai F-statistic atau F hitung adalah sebesar 7.821363 yang dimana lebih besar dari F tabel yaitu 2.81 (Hasil ini diperoleh dari hasil uji OLS pada Tabel 4.4 dan selengkapnya berada di lampiran 5, F tabel dilihat dari <https://junaidichaniago.files.wordpress.com> dengan k-1 dan n-k atau 4-1= 3, 50-4= 46). Hal ini berarti dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), kesehatan (X2), dan infrastruktur (X) bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

4.1.3.5.3 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Diketahui jumlah observasi adalah 50 dan jumlah variabel adalah 4 dengan taraf signifikansi 5% (0,05), maka t tabel sebesar 1.678 (Hasil t tabel diperoleh dari n-k atau 50-4= 46 dengan $\alpha = 5\%$ dan t tabel dilihat dari <https://junaidichaniago.files.wordpress.com>). Apabila t-statistic $>$ t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

1) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka panjang memiliki t hitung sebesar 3.06327 (Hasil pengujian dari β_1/Se_1 dari Tabel 4.4) dimana lebih besar dari t kritis 1.678 dengan probabilitas sebesar 0.0037 yang lebih kecil dari alpha 5%. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka panjang memiliki t hitung sebesar 2.3550 (Hasil pengujian dari β_2/Se_2 dari Tabel 4.4) dimana lebih besar dari t kritis 1.678 dengan probabilitas sebesar 0.0228 yang lebih kecil dari alpha 5%. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dalam jangka panjang memiliki t hitung sebesar -3.5742 (Hasil pengujian dari β_3/Se_3 dari Tabel 4.4) dimana lebih kecil dari t kritis 1,678 Sehingga variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dalam jangka panjang negatif namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data time series pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi periode 1969-2019. Dari hasil pengolahan data time series dilakukan dengan analisis regresi metode Ordinary Least Squares (OLS) pada jangka panjang. Hasil regresi dengan metode OLS ditunjukkan oleh Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Estimasi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	166072.4	24550.15	6.764617	0.0000
D(X1)	11.29257	3.686438	3.063274	0.0037
D(X2)	8.309861	3.528455	2.355099	0.0228
D(X3)	-13.19291	3.691123	-3.574226	0.0008

Sumber: lampiran 5

Sehingga persamaan model jangka panjang ditunjukkan oleh:

$$Y_t = 166072.4 + 11.29257X1_t + 9.309861X2_t - 13.19291X3_t + \varepsilon_t$$

Berdasarkan tabel 4.11 dan persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai koefisien konstanta pada jangka panjang sebesar 166072.4 Koefisien X1 dan X2 berpengaruh secara positif dan signifikan, sedangkan X3 negatif serta signifikan.

Selanjutnya, merujuk pada hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian.

4.2.1 Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka panjang signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia dengan koefisien 11.29257. Hal ini berarti dalam jangka panjang perubahan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 11%. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak dalam jangka panjang. Artinya apabila pemerintah terus mengoptimalkan pengeluaran sektor

pendidikan, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut menjadi faktor yang dapat meningkatkan PDB Indonesia.

Menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini hasilnya sesuai dengan teori. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Norman Baldwin dan Stephen A. Borrelli (2008), Amit Kundu (2018), Ebringa (2012) bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan bisa dirasakan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Todaro (2003) bahwa pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dua sektor lainnya.

4.2.2 Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka panjang signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia dengan koefisien 8.309861. Hal ini berarti dalam jangka panjang perubahan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 8%. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian karena berpengaruh positif dan signifikan. Menurut teori, hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan

jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui anggaran pengeluaran sektor kesehatan.

Anggaran kesehatan sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, artinya apabila pemerintah terus mengoptimalkan pengeluaran sektor kesehatan, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut menjadi faktor yang dapat meningkatkan PDB Indonesia.

Hasil penelitian ini dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Narayan Sethi, dkk (2020), Ebringa (2012), Avinash Kaur (2020), Amit Kundu (2018) yang menunjukkan hasil dari pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian dari Desi Dwi Bastias (2010), Shantayanan Devarajan, dkk (1996) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian serta kegiatan keluarga berencana. Semakin baik pemerintah mengoptimalkan anggaran kesehatan, semakin baik juga tingkat kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, semakin baik juga fisik mereka dalam produktif. Maka dari itu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB.

4.2.3 Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena nilai koefisien negatif. Koefisien pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur sebesar -13.19291. Hal ini berarti ketika terjadi

peningkatan pengeluaran sektor infrastruktur sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 13%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang dimana pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena pembangunan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga ketika pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur yang besar dan membutuhkan waktu yang panjang untuk pembangunannya, maka diwaktu dalam pembangunannya PDB tidak akan memperoleh hasil keuntungan dari pengeluaran infrastruktur tersebut, sehingga PDB akan menurun. Namun akan terasa dampaknya dalam waktu jangka panjang yang lebih lama lagi, dimana ketika tersedianya infrastruktur akan memunculkan investasi baru dari pihak swasta sebagai investornya yang nantinya akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat.

Salah satu rendahnya investasi dapat disebabkan oleh rendahnya ketersediaan infrastruktur sehingga integrasi ekonomi tidak terwujud dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud, infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan mampu melakukan pemerataan pembangunan pasti dapat melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya.

Pengeluaran sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi karena proyek penyediaan perumahan yang dibiayai dari anggaran pemerintah bagi masyarakat berlangsung lebih dari 10 tahun, hal ini berimbas pada kelambanan pengaruh pada sektor-sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Namun ketika pembangunan tersebut sudah selesai maka akan berasa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ebringa (2012) dan Shantayanan Devarajan, dkk (1996) yang menyatakan pengeluaran pemerintah

sektor infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Edward Nketiah Amponsah dan Bernard Sarpong (2019), Norman Baldwin dan Stephen A. Borrelli (2008), Desi Dwi Bastias (2010) yang menunjukkan hasil yang signifikan dari pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Musgrave (1989) dalam jangka panjang yang mengatakan pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat, barang publik yang dimaksud dapat berupa penyediaan infrastruktur.